

## Apdesi Bantul Netral dalam Pilkada

**BAMBANGLIPURO (KR)** - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bantul mengambil sikap netral dalam Pilkada Bantul 9 Desember 2020 mendatang. Apdesi tidak akan berpihak pada salah satu calon Bupati/Wakil Bupati. Jika ada lurah ataupun perangkat desa nekat mendukung pada salah satu calon bupati/wakil bupati risiko ditanggung sendiri.

Ketua DPC Apdesi Kabupaten Bantul, Ani Widayani, didampingi Sekretaris DPC Apdesi Bantul, Dwi Yuli Purwanti, Jumat (2/10), mengungkapkan bersama 75 lurah desa di Kabupaten Bantul sepakat

untuk netral dalam Pilkada mendatang. Tidak hanya lurah desa, Ani juga minta semua perangkat desa untuk tidak berpihak pada salah satu calon. "Tidak hanya lurah desa yang kami minta untuk netral

dalam Pilkada Bantul, tapi semua perangkat desa di 75 kelurahan kami minta untuk netral," ujar Ani.

Dwi Yuli Purwanti menambahkan, sikap netral DPC Apdesi Bantul harus sesuai dengan persidangan. "Acuannya ialah UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kemudian UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, juga UU No 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota, dengan dasar itulah kami harus bersikap netral," ujar Dwi Yuli. Selain itu, rakyat Bantul sudah cerdas untuk menentukan pilihan. (Roy)-f



KR-Sukro Riyadi

Pernyataan sikap pengurus DPC Apdesi Kabupaten Bantul netral dalam Pilkada.

### KOMISI D DPRD SLEMAN MEMINTA

## Penegakan Protokol Kesehatan di Pilkada Diperjelas

**SLEMAN (KR)** - Komisi D DPRD Kabupaten Sleman meminta detail penegakan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 perlu diperjelas. Hal itu untukantisipasi terjadinya lonjakan atau kluster baru dalam Pilkada nanti. Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Sleman M Zuhdan SPd mengatakan, sebagaimana diketahui bersama, lonjakan Covid-19 di Kabupaten Sleman masih terjadi. Jika memang memaksa Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 ini, detail penegakan protokol kesehatan harus diperjelas. "Kenapa ini perlu diperjelas dan dipertegas, karena Pilkada

ini rentan menjadi kluster baru. Soalnya Pilkada ini akan mengumpulkan massa yang banyak," kata Zuhdan kepada KR, Jumat (2/10).

Untuk itu, penyelenggara Pilkada perlu melakukan koordinasi dengan eksekutif dalam kaitannya penegakan protokol kesehatan. Hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini.

"Lansia dan orang tua itu sangat rentan tertular virus Corona. Padahal mereka itu juga punya hak suara dalam Pilkada. Tentunya ini perlu yang dipikirkan oleh penyelenggara pemilu. Jangan sampai nantinya partisipasi masyarakat

dalam Pilkada rendah karena penegakan protokol kesehatan tak jelas," ucapnya.

Di samping itu, penyelenggara dan eksekutif juga perlu mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus pascapencoblosan nanti. Salah satunya perlu menyiapkan tempat isolasi bagi masyarakat yang positif Corona kluster Pilkada.

"Pemerintah harus siap menghadapi lonjakan. Kalau memang tempat isolasi terbatas, pemerintah perlu membuat skema tata cara isolasi mandiri berbasis masyarakat. Harapannya kalau itu benar-benar terjadi, pemerintah tidak gagap dan masyarakat sudah paham apa yang harus dilakukan," pinta Zuhdan. (Sni)-f

### MESKI MEMILIKI IZIN RESMI

## Penambang Ingin Gabung, PT CMK Terbuka

**SLEMAN (KR)** - Meski telah memiliki izin lengkap dan resmi untuk melakukan penambangan pasir di Sungai Progo wilayah Sendangagung Minggu Sleman, PT Citra Mataram Konstruksi (CMK) masih membuka dialog dengan warga Jomboran Sendangagung yang menolak adanya penambangan menggunakan alat berat.

Kuasa Hukum PT MCK, Yacob Richwanto SH MH CIL bersama timnya terdiri Layung Purnomo SH MH CIL, Moch Zulkarnain Ali Mufthi SH MH CIL, Dimas Triambodo SH, Jumat (2/10), mengungkapkan pihaknya sangat terbuka untuk berdialog meski telah melakukan 4 kali sosialisasi.

PT CMK memiliki Rekomendasi Teknis untuk usaha penambangan pada Sumber Air No SA 0203-ag.4.2/33 tertanggal 9 Januari 2020 dari BBWSSO, Izin Lingkungan dari Kepala Dinas Perizinan dan Pe-

nanaman Modal/PPM No.667/03719/PZ/2020 tertanggal 14 April 2020, Izin dari ESDM yang meliputi Rekomendasi Eksplorasi, Studi Kelayakan, Pasca Tambang, Pemberdayaan Masyarakat/PPM, Sarana dan Prasarana, RKAB Eksplorasi, RKAB Operasi Produk.

Diakui, di lokasi penambangan akan dilakukan PT CMK ada penambang mandiri tapi tidak mempunyai izin alias ilegal. "Kami masih menerima mereka jika ingin bergabung dengan PT CMK. Tapi yang jelas, di area kami menambang tidak diperkenankan ada penambang lain karena itu menyalahi ketentuan yang ada," tegasnya.

Yacob mengungkapkan, sebisa mungkin PT CMK bisa beroperasi sebelum pergantian musim. Sebab jika musim penghujan, sangat sulit mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan untuk menambang

pasir. "Sebelum musim penghujan, kami berharap PT CMK sudah bisa melakukan penambangan. Sehingga prakontra yang terjadi di masyarakat diharapkan selesai," harapnya.

Sesuai kesepakatan dengan warga, PT CMK siap memberikan kompensasi bagi warga terdampak maupun desa dan dukuh yang ada di sekitarnya. Tapi tetap saja ada yang menolak.

Sebagaimana diketahui, warga yang menentang rencana penambangan menggunakan alat berat oleh PT KMC melakukan audiensi ke Kantor Balai Besar Sungai Serayu-Opak (BBWSSO) di Jalan Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman. Penolakan rombongan warga Jomboran itu karena penambangan menggunakan alat berat dikhawatirkan akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan sumber mata air. (Zie)-f

## Pemkab Bantul Bakal Punya Mobil PCR

**BANTUL (KR)** - Pemkab Bantul bakal memiliki mobil Polymerase Chain Reaction (PCR). Mobil senilai Rp 4,6 miliar ini rencananya sebagai solusi percepatan pengujian data pasien Covid-19 dari Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul, Agus Budi Rahardjo MKes, Jumat(2/10), menuturkan diperkirakan mobil tersebut akan datang pada November mendatang. Mobil PCR mendesak diadakan mengingat kasus Covid-19 di Kabupaten Bantul masih terus melaju tinggi.

"Selain melakukan pengadaan mobil PCR, Bantul juga perlu menyediakan gedung sebagai laboratorium. Namun hal itu dinilainya lebih sulit, maka kami memilih mobil, karena kalau menggu-

nakan gedung harus mengubah dan memenuhi standar laboratorium biosafety," jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Drs Helmy Jamharis menambahkan mobil PCR telah memenuhi standar dan daya kontaminasinya terjaga. Adapun mobil ini memiliki kapasitas 450 kali pemeriksaan dan dapat memangkas waktu pemeriksaan. Di mana hanya membutuhkan waktu satu jam untuk mendapatkan hasilnya.

"Keberadaan mobil PCR sangat kami butuhkan. Adapun kesiapan teknis yang dilakukan Pemkab Bantul yakni mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berupa tenaga kesehatan (nakes) yang beroperasi di mobil PCR untuk penanganan Covid-19," jelasnya. (Aje)-f

### TERDAMPAK JALAN TOL

## Dua SD Dibangunkan Gedung Baru

**SLEMAN (KR)** - Dua sekolah yang terdampak pembangunan Tol Yogya-Solo maupun Yogya-Bawen meminta relokasi. Sedangkan opsi menggabungkan sekolah terdampak jalan tol dengan sekolah lain belum dilakukan karena mengingat jumlah siswa yang terlalu banyak.

Kepala Dinas Pendidikan Sleman Ery Widaryana menjelaskan, sejauh ini sekolah yang terdampak pembangunan jalan tol yakni SDN Nglarang di Kepanewon Mlati dan SDN Banyurejo 1 di Kepanewon Tempel. Pilihan relokasi ini agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Hingga saat ini opsi relokasi ini masih dalam pembahasan di Badan Kepegawaian dan Arsip Daerah (BKAD) Sleman.

"Ada dua SD yang terdampak. Betul akan direlokasi dan pembahasan ada di BKAD dan tim. Penggabungan sekolah tidak, karena siswa banyak," terang Ery di kantornya, Jumat (2/10).

Kabid Sarpras Disdik Sleman Sri Adi Marsanto menambahkan, dalam proyek pembangunan jalan tol, SDN Nglarang hanya terdampak sebagian dari proyek Exit Tol Yogya-Solo. Bahkan dimungkinkan sebagian bangunan masih bisa di-

tempati awal. Sedangkan untuk sebagian bangunan yang terdampak, akan dibangun kembali. "Akan kami bangun lagi. Kalau kena pasti ada penggantian. Tetap bisa berdiri di lokasi awal. Masyarakat juga masih menghendaki SD berdiri di situ," bebernya.

Sedangkan untuk SDN Banyurejo 1, bangunannya terdampak secara keseluruhan. Nantinya akan dicarikan tempat pengganti yang tidak terlalu jauh dari lokasi bangunan awal. Untuk proses pembangunan gedung baru sendiri menjadi tanggungjawab Pemkab Sleman.

"Untuk proyek pembangunan kembali tanggung jawab Pemkab Sleman melalui Disdik Sleman. Relokasi masih di daerah situ juga oleh tanah kas desa yang disediakan Pemdes Banyurejo," tandas Adi Marsanto.

Agar tidak mengganggu proses belajar, pembangunan gedung baru akan dilakukan sebelum bangunan lama dirobohkan. Kedua SD ini masih sangat dibutuhkan dan masyarakat berharap agar nantinya bangunan baru tidak terlalu jauh dengan bangunan awal. "Kedua SD ini masih dibutuhkan masyarakat di sana," tutupnya. (Aha)-f

### TINDAK TEGAS PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN

## Plt Bupati Bantul Minta Masukan

**BANTUL (KR)** - Selama tahapan kampanye Pilkada 2020 di Bantul, jajaran Forkompimda, KPU dan Bawaslu Kabupaten Bantul mengadakan Coffee Morning setiap Jumat pagi, dimulai Jumat (2/10).

Menurut Plt Bupati Bantul, Budi Wibowo SH MM, kegiatan coffee morning Forkompimda Bantul bertujuan untuk memonitor dan evaluasi jalannya Pilkada 2020 di Bantul, agar bisa berjalan aman, lancar dan

damai, termasuk upaya mencegah penularan Covid-19 selama kegiatan tahapan kampanye.

"Karena itu, dalam kegiatan setiap pekan pada hari Jumat ini, saya minta masukan-masukan dari jajaran Forkompimda serta KPU dan Bawaslu, tentang bagaimana kejadian-kejadian pelaksanaan Pilkada yang sudah masuk tahapan kampanye ini untuk dievaluasi," jelas Budi Wibowo.

Masukan yang perlu diantarkan, kegiatan kampanye yang hanya dibatasi 50 orang untuk kampanye dalam gedung atau ruangan dan 100 orang di tempat terbuka. Maka semua kegiatan kampanye Pilkada yang melakukan pelanggaran aturan pelaksanaan Pilkada maupun pelanggaran protokol kesehatan akan dikenakan sanksi. Pihak kepolisian akan berlaku tegas bagi pelanggar protokol kesehatan, demi mencegah penularan Covid-19.

Budi Wibowo juga minta kepada semua ASN atau pegawai negeri di Kabupaten Bantul, untuk menjaga netralisasi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

"Semua aparat pegawai negeri tidak boleh dukung mendukung pasangan calon bupati selama pelaksanaan tahapan Pilkada," ungkap Budi Wibowo.

Sementara Asek Bantul menambahkan, sejak tahapan kampanye Pilkada 2020 di Bantul pihak kedua pasangan calon mengajukan izin mengadakan kegiatan kampanye yang akan menghadirkan massa lebih dari ketentuan, sehingga kegiatan tersebut ditolak penyelenggaraannya.

Coffee morning perdana kemarin selain dihadiri jajaran Forkompimda, juga Sekda Bantul, Drs H Helmi Jamharis yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Covid-19 Bantul, Ketua KPU, Ketua Bawaslu Bantul, serta jajaran OPD terkait. Untuk coffee morning Jumat pekan depan di selenggarakan di Mapolres Bantul. (Jdm)-f



KR-Judiman

Coffee Morning Forkompimda Bantul di ruang Bupati, Jumat (2/10)

## Penutupan Diklat FDS Pendamping PKH Putaran ke-7

"SETELAH pelatihan ini, Pendamping PKH harus menyampaikan isi dari modul-modul Family Development Session kepada para Kelompok Penerima Manfaat (PKM) agar kualitas kehidupannya semakin membaik dan mengubah pola pikir mereka."

Demikian disampaikan Dr Harapan Lumban Gaol, Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, BP3S Kemensos RI saat menutup Diklat FDS Pendamping PKH Putaran ke-7 di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, Kamis (1/10).

Diklat FDS putaran ke-7 di BBPPKS Yogyakarta dilaksanakan dari tanggal 21 September s/d 1 Oktober 2020 secara e-learning dengan mengakses elearning.kemosos.go.id. Peserta diklat adalah Pendamping PKH di wilayah Prov Jateng, Jatim, DIY

dan NTB.

Dalam diklat e-learning FDS terdapat 2 tahap, yakni *Unsinkronus* belajar mandiri dan *sinkronus* belajar dengan fasilitator/widyaiswara. Saat *Unsinkronus* peserta diklat harus mendalami teori-teori dan materi secara konseptual. Sedang saat *unsinkronus*, yang diasah adalah keterampilan pendamping di lapangan secara *real, soft skill* yang diutamakan.

Bagaimana menampilkan 5 modul kepada KPM secara praktis dan mudah dipahami KPM, terangnya. "Selanjutnya dengan dampingan dan pengetahuan yang disampaikan oleh para pendamping, KPM menjadi paham mengenai stunting, pengasuhan anak, pengelolaan ekonomi," papar Gaol.

"Bagaimana KPM dapat memanfaatkan bantuan untuk modal menjadi keluarga mandiri dan memenuhi kebutuhan dasar. Diharapkan KPM bisa memahami dari modul yang dipelajari di diklat Sinkronus. Kalau KPM belum memahami maka pendamping perlu untuk mengevaluasi diri," terang Sekretaris BP3S.

Gaol juga mengingatkan agar kita jangan menyesali kenapa tidak dapat bertemu tatap muka seperti dulu. Saat ini, menurutnya, kita harus mengikuti normal baru.

Gaol meminta para pendamping saat kembali di lapangan dapat mengubah perilaku KPM menjadi hidup sehat dan mendapatkan pendidikan untuk mencapai kehidupan lebih baik. PKH diharapkan dapat memotong kemiskinan. "Apabila perilaku KPM tidak berubah, berarti PKH tidak berhasil, artinya pendamping gagal. Ke depan, Indonesia harus bebas stunting, angka *drop out* menurun dan partisipasi sekolah meningkat," terangnya. (\*)-f



KR-Istimewa

Dr. Harapan Lumban Gaol, pada penutupan Diklat FDS putaran ke-7 secara daring.